

**RINGKASAN EKSEKUTIF  
DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAERAH  
TAHUN 2016  
KOTA BOGOR**





# WALIKOTA BOGOR

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan perlu didukung data dan informasi lingkungan hidup yang akurat, lengkap dan berkesinambungan. Informasi tersebut harus menggambarkan keadaan lingkungan hidup, tekanan yang terjadi terhadap lingkungan hidup dan permasalahan yang timbul, sehingga Pemerintah dapat menentukan kebijakan yang akan diambil dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) telah menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Kota Bogor atau atau yang dulu disebut Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), yang merupakan laporan tahunan tentang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Laporan tersebut harus menggambarkan keadaan lingkungan hidup baik penyebab dan dampak permasalahannya maupun respon Pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

DIKPLH disusun untuk memenuhi Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bab VIII tentang Sistem Informasi pasal 62 ayat (1-3) yang menjelaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi

lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lain.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) ini merupakan sarana yang penting untuk mengkomunikasikan keadaan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keadaan lingkungan serta membantu pengambil keputusan menentukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan.

DIKPLH Kota Bogor menjadi sangat penting karena menyajikan perubahan penduduk dengan kualitas dan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan penduduk. Keterbatasan lingkungan dan teknologi mengharuskan tekanan terhadap lingkungan dikendalikan agar tidak terjadi bencana ekologi. Kesadaran agar lingkungan tetap berlanjut untuk menopang pembangunan akan dapat dilihat dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat maupun pihak lainnya. Informasi tentang tekanan, kondisi dan upaya yang dilakukan terhadap lingkungan mulai dari Kabupaten/Kota dan Provinsi diharapkan dapat menjadi pertimbangan utama dalam membuat perencanaan lingkungan, baik pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, maupun Nasional. Informasi ini pula akan memenuhi kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam penyusunan DIKPLH Kota Bogor Tahun 2016 digunakan pendekatan P-S-R (Pressure, State, Response) yang mengacu kepada Standar Internasional dalam penulisan laporan sejenis serta berdasarkan pada penyempurnaan pedoman penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) 2016. DIKPLH Kota Bogor

Tahun 2016 menggambarkan berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bogor selama Tahun 2016, antara lain tekanan dan dampak lingkungan hidup, kondisi kualitas lingkungan hidup, dan berbagai respon atau upaya yang dilakukan baik oleh Pemerintah atau masyarakat dalam bentuk kebijakan maupun program untuk menangani dampak lingkungan yang terjadi.

Penyusunan Laporan DIKPLH ini merupakan hasil pengkajian keadaan lingkungan hidup guna memberikan gambaran atas dampak kegiatan manusia dan alam yang terjadi terhadap lingkungan hidup di Kota Bogor. Laporan DIKPLH ini selain sebagai acuan bagi penyelenggaraan pembangunan di Kota Bogor juga bermanfaat bagi masyarakat secara umum, bagi pengusaha, peneliti dan pemerhati lingkungan hidup di Kota Bogor.

Atas diterbitkannya Laporan DIKPLH ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Instansi/Dinas/Lembaga dan Konsultan serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan DIKPLH ini. Semoga Laporan DIKPLH ini dapat menjadi bahan masukan yang baik bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bogor, Desember 2016  
Walikota Bogor,

Dr. Bima Arya Sugiarto

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Nirwasita Tantra adalah penghargaan Pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah terpilih atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerjanya guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.

Pemberian penghargaan Nirwasita Tantra dimaksudkan untuk mendorong para Kepala Daerah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan/atau program di daerahnya yang menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hal inilah yang melatarbelakangi Kota Bogor untuk menyusun Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2016 sebagai wujud akuntabilitas dalam menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan.

### **B. PROFIL ATAU KEADAAN UMUM DAERAH TERMASUK KEKHUSUSAN KONDISI EKOLOGISNYA**

Kota Bogor berdasarkan PP No. 44/1992, perwakilan kecamatan Tanah Sareal ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No.13 Tahun 2008, wilayah Kota Bogor terdapat 6 kecamatan dan 68 kelurahan.

Kota Bogor dengan luas 11.850 ha, terletak pada 106°43'30" Bujur Timur sampai dengan 106°51'00" Bujur Timur dan 6°30'30" Lintang Selatan sampai dengan 6°41'00" Lintang Selatan, ± 56 Km Selatan dari Ibu Kota Jakarta dan ± 130 Km Barat Kota Bandung, Ibukota Provinsi Jawa Barat.

### **C. GAMBARAN SINGKAT PROSES PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS**

Penetapan Isu prioritas Kota Bogor ditentukan berdasarkan RPJMD yang sudah ditetapkan. Mengacu dari hasil sosialisasi mengenai pedoman penyusunan terbaru, penetapan isu prioritas minimal 3 (tiga) maksimal 5 (lima) yang didasarkan proses partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di Kota Bogor.

Dalam hal ini penetapan isu di RPJMD sudah melalui proses yang partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penetapan Isu prioritas Kota Bogor meliputi :

- 1) Pengelolaan Sampah Yang Belum Terpadu
- 2) Pencemaran Lingkungan Dan Perubahan Iklim mikro Kota Bogor
- 3) Mobilitas Penduduk Yang Aman, Efektif, Efisien, Dan Ramah Lingkungan.

### **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar pertimbangan oleh Kepala Daerah guna menetapkan dan melaksanakan kebijakan, dan/atau program berwawasan lingkungan di Kota Bogor.
2. Sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk semua stake holder.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan kefahaman akan kecenderungan dan kondisi lingkungan.
2. Memfasilitasi pengukuran kemajuan menuju keberlanjutan.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Bogor.

## **E. RUANG LINGKUP PENULISAN**

Ruang Lingkup Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dimulai dari tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan laporan hingga penyampaian dokumen laporan ke Kementerian LHK. Penyusunan laporan merupakan inti dari *business process* yang selanjutnya mengacu kepada Pedoman penyusunan yang terbaru yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK. Terkait dengan waktu pelaksanaannya sampai dengan batas waktu penyampaian dokumen yang selanjutnya ditetapkan lewat Permen LHK yang terkait.

## **BAB II ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

### **A. DESKRIPSI KONDISI KOTA BOGOR**

Kota Bogor sebagai daerah penyangga ibukota memiliki kekhasan aktifitas dan mobilitas penduduk. Sebaran aktifitas atau kegiatan di Kota Bogor berpusat di pusat kota. Hal ini terlihat dari dominasinya keberadaan pusat Kota Bogor (berada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah) untuk kegiatan utama kota seperti perdagangan dan jasa, perkantoran, pemerintahan dan fasilitas transportasi, semua berada pada kawasan ini.

### **B. PROSES PERUMUSAN ISU PRIORITAS**

Dalam perumusan isu prioritas pada dokumen kinerja isu disesuaikan dengan isu prioritas yang ada di RPJMD khususnya yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup dan sesuai dengan dokumen KLHS Kota Bogor. Proses penetapan isu prioritas di RPJMD melalui proses yang partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penetapan Isu prioritas Kota Bogor meliputi :

- 1) Pengelolaan Sampah Yang Belum Terpadu.
- 2) Pencemaran Lingkungan Dan Perubahan Iklim mikro Kota Bogor.
- 3) Mobilitas Penduduk Yang Aman, Efektif, Efisien, Dan Ramah Lingkungan.

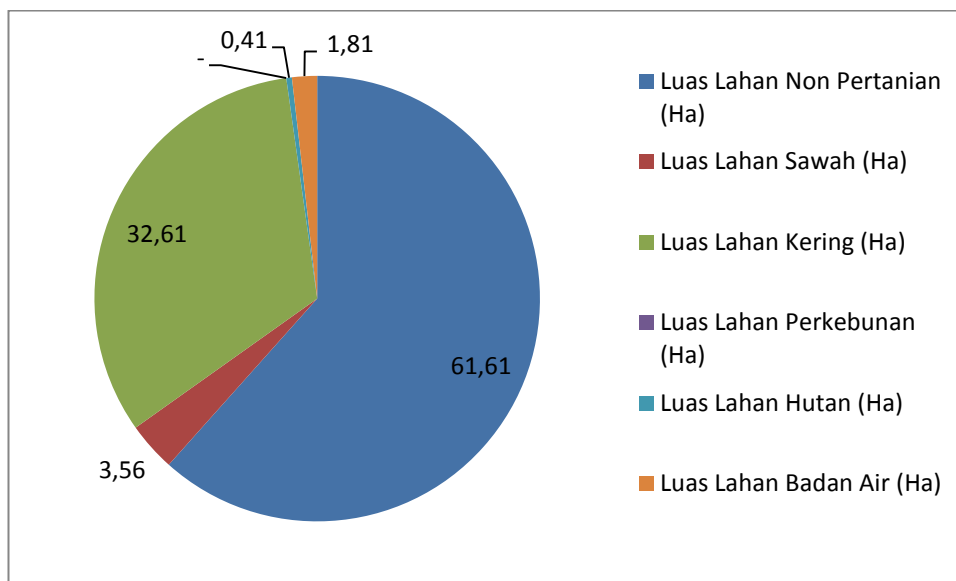
### **BAB III**

## **ANALISIS PRESSURE, STATE, DAN RESPONSE**

### **ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

#### **A. TATAGUNA LAHAN DAN LAUT**

Secara umum penggunaan lahan dikelompokkan menjadi lahan non pertanian, sawah, lahan kering, perkebunan, lahan hutan, dan badan air.



Gambar 3.1. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kota Bogor

Pada tahun 2016, Kota Bogor melakukan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan beberapa cara seperti kegiatan penghijauan dan peningkatan luas taman kota. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi pembangunan infrastruktur seperti hotel, mall, perumahan dan industri.



## **B. KUALITAS AIR**

Secara umum wilayah Kota Bogor dialiri oleh dua sungai besar dan tujuh anak sungai, yang secara keseluruhan anak-anak sungai itu membentuk pola aliran paralel-subpararel sehingga mempercepat waktu mencapai debit puncak (*time to peak*) pada dua sungai besar yaitu sungai Ciliwung dan Cisadane. Kota Bogor memanfaatkan kedua sungai ini sebagai sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum. Secara hidrologis, Kota Bogor berada pada tiga Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cimahpar, DAS Cikereti dan DAS Kali Baru. Selain sungai, Kota Bogor juga memiliki beberapa situ yakni; Situ Gede, Situ Panjang, dan Situ Angelena.

## **C. KUALITAS UDARA**

### **1. Tekanan Terhadap Kualitas Udara Kota Bogor (*Pressure*)**

Perkembangan Kota Bogor sebagai kota penyangga DKI Jakarta sangat pesat dalam hal jumlah kendaraan yang beredar. Jumlah kendaraan yang sangat tinggi tidak hanya hasil kontribusi penduduk Bogor saja tapi juga banyak penduduk Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi yang menjadikan Kota Bogor sebagai destinasi wisata untuk liburan. Khusus untuk jumlah kendaraan di Kota Bogor telah mengalami peningkatan yang begitu pesat.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan di tahun 2016, jumlah penderita penyakit pernapasan seperti penyakit ISPA, nesoparangitis, faringitis mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 dan 2015.

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seharusnya dapat menjaga Kota Bogor dari perubahan iklim mikro. Perubahan Iklim mikro yang terjadi adalah peningkatan suhu udara dan penurunan tingkat kelembaban.

## **2. Upaya Peningkatan Kualitas Udara Kota Bogor (*Response*)**

Pengelolaan RTH di Kota Bogor yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi RTH dan kualitas lingkungan tidak hanya melibatkan Pemerintah Kota Bogor. Perlu adanya dukungan swasta, dan masyarakat.

### **D. RESIKO BENCANA.**

#### **1. Bencana Longsor**

Kota Bogor dengan kondisi topografi yang berbukit-bukit. Morfologi tanahnya terbagi dalam dua hamparan. Hal ini dapat mempunyai potensi rawan longsor yang besar sehingga mengakibatkan kerugian jiwa dan materil. Bencana longsor kerap terjadi di Kota Bogor. Selama tahun 2016 telah terjadi 17 kejadian dengan perkiraan total kerugian materil sebesar Rp. 888.000.000, akan tetapi tidak terdapat korban jiwa.

#### **2. Bencana Banjir**

Selain bencana longsor, Bencana banjir juga terjadi di Kota Bogor. Sepanjang tahun 2016 tercatat terjadi bencana banjir sebanyak 3 kejadian. Banjir terjadi di Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Selatan dengan perkiraan kerugian sebesar Rp.100.000.000.

#### **3. Bencana Kebakaran Lahan**

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor di tahun 2016. Bencana kebakaran lahan termasuk bencana yang sering terjadi di Kota Bogor. Sepanjang tahun 2016 tercatat sebanyak 16 kejadian. dengan perkiraan total kerugian materil sebesar Rp. 2.224.000.000.

#### **4. Kondisi dan Permasalahan Drainase di Kota Bogor**

Permasalahan banjir dan genangan air dikawasan perkotaan di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan buruknya sistem jaringan drainase. Sarana drainase berkurang karena adanya endapan dan sampah. Sampah ini dapat terangkut ke dalam sarana drainase secara alami karena jatuh dari pohon tetapi dapat pula karena ketidakhahaman penduduk yang kurang menyadari akibat lebih lanjut yang merugikan. Penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke dalam saluran drainase, perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara terus menerus.

Beberapa permasalahan dan faktor penyebab yang terkait dengan kondisi sistem drainase di kota Bogor saat ini, yaitu antara lain :

- a) Belum terintegrasinya sistem drainase satu wilayah dengan wilayah lain disekitarnya.
- b) Meningkatnya intensitas curah hujan
- c) Pendangkalan dan penyempitan jaringan drainase makro.
- d) Berubah fungsi saluran irigasi menjadi saluran drainase, khususnya di kawasan Bogor Utara.
- e) Mix Drain,

## **5. Review Masterplan Drainase Kota Bogor**

Secara garis besar, penyusunan sistem jaringan drainase di Kota Bogor tetap direkomendasikan untuk mengikuti rencana pada masterplan tahun 2007,

## **6. Konsep Drainase Berwawasan Lingkungan**

Dengan perkembangan berfikir komprehensif serta didorong oleh semangat antisipasi perubahan iklim yang dewasa ini terjadi, maka diperlukan perubahan konsep drainase menuju ke drainase ramah lingkungan atau eko-drainase (paradigma baru). Dengan konsep drainase ramah lingkungan tersebut, maka kelebihan air hujan tidak secepatnya dibuang ke sungai terdekat.

Konsep drainase baru (paradigma baru) yang biasa disebut drainase ramah lingkungan atau eko-drainase atau drainase berwawasan lingkungan yang sekarang ini sedang menjadi konsep utama di dunia internasional dan merupakan implementasi pemahaman baru konsep eko-hidrolik dalam bidang drainase.

## **7. Matriks Risiko Bencana Sebagai Sarana Identifikasi Permasalahan Bencana**

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengidentifikasi risiko bencana, yaitu dengan memetakan risiko. Wilayah yang menjadi objek identifikasi adalah seluruh wilayah di Kota Bogor hingga tingkat kelurahan. Dalam hal ini seluruh wilayah memiliki karakteristik berbeda berdasarkan :

- jenis ancaman;
- tingkat risiko;
- ancaman berdasarkan nilai indeks dan kelas ancaman;
- kerentanan berdasarkan angka kependudukan, harta benda, dan kondisi lingkungan; dan
- kapasitas setiap wilayah dalam menghadapi bencana.

## **8. Pembekalan Manajemen Penanggulangan Bencana**

Pada tanggal 25 Juli 2016 diadakan Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana yang diadakan BPBD dengan peserta aparat Pemerintah Kota Bogor. Acara ini bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi setiap aparat dalam menghadapi bencana.

## **E. PERKOTAAN.**

### **1. Kondisi Dan Permasalahan Perkotaan**

Peningkatan sampah domestik tersebut tidak hanya terjadi dari segi jumlah dan volume saja, tetapi terjadi pula pada keanekaragaman bentuk, jenis, serta komposisinya. Faktor yang menjadi tekanan (*pressure*) dalam permasalahan sampah adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk.
2. Peningkatan konsentrasi penduduk perkotaan pada pusat-pusat kawasan yang disebabkan karena pertumbuhan penduduk, destinasi wisata dan urbanisasi.
3. Peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Bogor.

Sesuai dengan tabel perubahan penggunaan lahan, terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal penggunaan lahan untuk perdagangan dan jasa di Kota Bogor. Semakin banyaknya pusat perbelanjaan dan hotel berimplikasi terhadap meningkatnya aktifitas perdagangan dan jasa yang pada akhirnya meningkatkan volume timbulan sampah.

### **2. Upaya Penanganan Masalah Perkotaan**

1. Aspek Kelembagaan
2. Rencana Pengelolaan Sampah Regional

## **BAB IV**

# **INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

## **A. UPAYA PENGURANGAN SAMPAH MELALUI TPS 3R DAN BANK SAMPAH**

Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis 3R merupakan faktor yang sangat penting dalam pengurangan volume sampah. Upaya ini dimaksudkan untuk

memanfaatkan material yang masih berguna untuk digunakan kembali, dan secara tidak langsung proses ini dapat memperpanjang umur pakai TPA.

## **TAMAN TEMATIK**

Pada tahun 2016, taman tematik yang dibangun sebanyak 4 taman, yaitu sebagai berikut :

1. Taman Matematika di Kelurahan Tegal Gundil yang bertemakan matematika;
2. Taman Sempur di Kelurahan Sempur yang bertemakan rekreasi keluarga dan olah raga;
3. Taman Calincing di Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara yang bertemakan taman lingkungan atau taman kekerabatan;
4. Taman Kaulinan di Kelurahan Sempur yang bertemakan permainan tradisional anak-anak.

## **B. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor menggunakan sistem *off-site* (sistem terpusat) dan sistem *on-site* (sistem setempat). Cakupan pelayanan sistem *off-site* atau sistem perpipaan yang dilengkapi dengan unit pengolahan baru sebatas pada skala kawasan yang berlokasi di Perumahan Indraprasta. Kota Bogor memiliki 1 IPAL dan 1 IPLT yang berlokasi dalam satu kawasan dengan luas sekitar 1,4 Ha di Kecamatan Bogor Utara. IPAL Tegal Gundil sampai tahun 2016 baru melayani 406 sambungan rumah (SR) dari kapasitas 600 SR.

## **C. PENATAAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN UMUM**

1. Penerapan lalu lintas Sistem Satu Arah (SSA) seputar Kebun Raya Bogor (KRB) yang diarahkan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas yang meliputi keselamatan, kemacetan dan pelayanan angkutan umum.

2. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan kerjasama Optimalisasi Konverter Kit Angkutan Umum pengguna bahan bakar gas dengan CV. Saghina Anugerah Mas. Kerjasama dilakukan sebagai upaya pengembangan penggunaan bahan bakar gas pada angkutan umum serta optimalisasi SPBG milik PT. PGN (Persero).

#### **D. PENATAAN PEDESTRIAN**

Pemerintah Kota Bogor mengembangkan jalur pedestrian sepanjang Kebun Raya Bogor. Selain dapat difungsikan untuk para pejalan kaki, pedestrian ini memang cocok juga jika dimanfaatkan untuk berlari dan bersepeda. Bahkan untuk warga difabel. Sebab pedestrian tersebut memang sudah dilengkapi jalur khusus pesepeda dan jalur bagi para difabel dilengkapi dengan pemandangan sekelilingnya yang asri, bersih, dan nyaman. Selain itu juga dilengkapi fasilitas yang hadir di jalur Pejalan Kaki Kebun Raya Bogor.